

# PERHIMPUNAN INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PERGERAKAN INDONESIA YANG REVOLUSIONER (1922-1930)

Penulis 1 : Atiqoh  
Penulis 2 : Sardiman A.M, M.Pd.  
Universitas Negeri Yogyakarta  
atik.hokita41@gmail.com

## ABSTRAK

Tahun 1908 berdirilah perkumpulan bernama *Indische Vereeniging* di Belanda. Pada perkembangannya *Indische Vereeniging* berubah menjadi organisasi politik revolusioner. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui (1) latar belakang berdirinya PI; (2) perkembangan awal PI tahun 1908-1922; (3) perubahan PI dari organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik (1922-1930).

Penelitian ini ditulis menggunakan metode sejarah Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, serta (5) penulisan (historiografi). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan politik, ekonomi dan sosiologis.

Pada saat didirikan tahun 1908 PI merupakan organisasi sosial-budaya sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa Indonesia di Belanda. PI mulai berubah kearah pergerakan politik sejak bergabungnya Tiga Serangkai yaitu E.F.E. Doves Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat tahun 1913. Semangat nasionalisme yang dibawa oleh Tiga Serangkai mampu mengubah pandangan anggota PI mengenai kedudukan Belanda sebagai pelindung organisasi. Pencapaian lainnya ialah dipublikasikannya majalah berkala *Hindia Poetra* tahun 1916. PI kemudian benar-benar berhaluan politik sejak tahun 1922 karena pengaruh dari generasi baru yang datang ke Belanda pasca PD I. Ditandai dengan perubahan nama organisasi dari *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging*. Untuk pertama kali kata "Indonesia" memiliki arti politik. Tahun 1925 PI mengeluarkan manifesto politiknya yang terdiri dari empat azas, (1) kesatuan nasional, (2) swadaya/berdikari, (3) non-kooperasi, dan (4) solidaritas. Akibat propaganda yang dilakukan alumni PI, manifesto politik PI kemudian menjadi landasan nasionalisme Indonesia yang terkristalisasi dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Kata Kunci: Perhimpunan Indonesia, Manifesto Politik, Nasionalisme.

## ABSTRACT

*In 1908 an organization called Indische Vereeniging was established in the Netherlands. In its development, Indische Vereeniging became a revolutionary political organization. This study aimed to investigate: (1) background of the establishment of PI; (2) the early development of PI in 1908-1922; and (3) the change of PI from a student organization into a political organization (1922-1930).*

*The study employed the critical historical method by Kuntowijoyo, consisting of five stages, i.e.: (1) topic selection, (2) source collection, (3) verification (historical criticism, source trustworthiness), (4) interpretation: analysis and synthesis, and (5) writing (historiography). The approaches in the study were political, economic, and sociological approaches.*

*When it was established in 1908, PI was a social and cultural organization as a means to gather Indonesian students in the Netherlands. PI began to change into a political organization when Tiga Serangkai (E.F.E. Doves Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, and Suwardi Suryaningrat) joined it in 1913. The nationalism spirit that Tiga Serangkai had was capable of changing PI members' views of the position of the Netherlands as the patron of the organization. Another attainment was the publication of the periodical *Hindia Poetra* in 1916. Then, PI really had a political orientation in 1922 because of the influence of the young generation coming to the Netherlands after World War I. It was marked by the change of the organization's name from *Indische Vereeniging* to *Indonesische Vereeniging*. For the first time the word "Indonesia" had a political meaning. In 1925 PI declared the political manifesto consisting of four principles, i.e.: (1) national unity, (2) autonomy, (3) non-cooperation, and (4) solidarity. Because of the propaganda made by PI alumni, PI's political manifesto became the foundation of the Indonesian nationalism, crystallized in the Sumpah Pemuda on 28 October 1928.*

Keywords: Perhimpunan Indonesia, Political Manifesto, Nationalism.

## I. Pendahuluan

Tahun 1864 pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan.<sup>1</sup> Kesempatan tersebut berdampak pada banyaknya lulusan yang dihasilkan. Sementara sekolah tak lagi mencukupi kebutuhan para lulusan yang ingin melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Maka sejak awal abad ke-20 mulai banyak pemuda-pemuda Indonesia pergi ke Belanda untuk meneruskan studi di perguruan tinggi.

Meningkatnya jumlah mahasiswa yang datang ke Belanda memunculkan kebutuhan untuk masuk dalam sebuah perkumpulan. Gagasan untuk menggabungkan diri dengan Budi Utomo dan Indische Partij, ternyata kurang sesuai.<sup>2</sup> Dibutuhkan organisasi yang tidak hanya menaungi golongan priyayi, golongan Indo Belanda atau etnis tertentu. Maka pada tahun 1908 didirikan *Indische Vereeniging* oleh mahasiswa Indonesia di Belanda, di antaranya Sutan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto.<sup>3</sup>

Mulanya *Indische Vereeniging* merupakan organisasi mahasiswa bersifat sosial-budaya yang menaungi para pemuda Indonesia di negeri Belanda.<sup>4</sup> *Indische Vereeniging* mulai meluaskan wawasannya kepada persoalan Tanah Air dan memasuki bidang politik sejak bergabungnya Suwardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan E.F.E Doves Dekker tahun 1913.<sup>5</sup> Pengaruh semangat nasionalisme yang dibawa oleh para pendatang baru tahun 1913 ini segera terlihat dengan diterbitkannya jurnal *Indische Vereeniging*, *Hindia Poetra* tahun 1916.<sup>6</sup>

Generasi baru kedua datang ke Belanda sekitar tahun 1920-an, di antaranya Sutomo, Hatta, Ali Sastroamidjojo, Budiarto, Iwa Kusumasumantri, dan Iskaq.<sup>7</sup> Selain itu datang pula tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia seperti Tan Malaka, Semaun, dan Darsono tahun 1921.<sup>8</sup> Segera setelah mahasiswa generasi kedua tiba, mereka lalu menggabungkan diri kedalam *Indische Vereeniging*. Bergabungnya tokoh-tokoh seperti Hatta dan Tan Malaka mengubah *Indische Vereeniging* menjadi lebih aktif secara politik. Perkembangan baru dalam tubuh *Indische Vereeniging* juga membawa perubahan nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922.<sup>9</sup> Perubahan nama *Indische Vereeniging* menjadi

---

<sup>1</sup> Akira Nagazumi. "Masa Awal Pembentukan "Perhimpunan Indonesia": Kegiatan Mahasiswa Indonesia Di Negeri Belanda, 1916-1917". Dalam Akira Nagazumi (ed). *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX-XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1986), hlm. 135.

<sup>2</sup> Sartono Kartodirdjo. *Sejak Indische Sampai Indonesia*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2005), hlm.5.

<sup>3</sup> Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamsi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), hlm. 60.

<sup>4</sup> Ingleson, John. "Perhimpunan Indonesia and The Indonesian Nationalist Movement." A.b. Nin Bakdisoemanto. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta: Temprint.1993), hlm. 1.

<sup>5</sup> Dhont, Frank. *Nasionalisme Baru Intelektual Inndonesia tahun 1920-an*. (Yogyakarta: UGM Press. 2005), hlm. 32.

<sup>6</sup> Ingleson, John. *op.cit.*, hlm.2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.3.

<sup>8</sup> Deliar Noer. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. (Jakarta: LPES. 1990), hlm. 39.

<sup>9</sup> Dhont, Frank. *op.cit.*, hlm. 14.

*Indonesische Vereeniging* juga menandai munculnya sasaran dan cita-cita perjuangan yang bersifat nasional lebih tegas.<sup>10</sup> Pada tahun 1925 di bawah kepemimpinan Soekiman Wirjosadjojo *Indonesische Vereeniging* berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).<sup>11</sup>

PI menjadi semakin reaksioner sejak Hatta menjabat sebagai ketua PI tahun 1926. Tuntutan-tuntutan mengenai kemerdekaan semakin gencar dilakukan oleh para Pemimpin PI. Kegiatan PI yang menuntut kemerdekaan mengkhawatirkan Menteri Jajahan. Bulan Februari 1927 atas perintah Menteri Jajahan, Penasihat Urusan Kemahasiswaan mengirimkan selebaran yang berisi pelarangan mengikuti kegiatan PI, jika tidak mengindahkan larangan ini maka beasiswa mereka di Belanda akan dicabut.<sup>12</sup> Tanggal 10 Juni diadakan penggeledahan di sekretariat PI dan pada 27 September, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid, dan Nazir ditangkap oleh Pengadilan Wilayah di Den Haag.<sup>13</sup> Bulan Maret 1928 keempat tokoh PI dihadapkan ke pengadilan, dan pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak bersalah.

Pasca pembebasannya, Hatta tetap menjadi anggota PI. Akan tetapi, dibandingkn sebelumnya, ia semakin sedikit meluangkan waktu untuk berkiperah dalam bidang politik, dan PI sendiri pada tahun 1928-29 jauh kurang aktif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<sup>14</sup> Tahun 1931 Hatta dikeluarkan dari PI dengan tuduhan tidak mampu menyesuaikan diri dengan disiplin PI yaitu berkonsultasi lebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.<sup>15</sup> Dikeluarkannya Hatta sebagai anggota PI menjadi akhir dari organisasi tersebut, karena kehilangan organisator utama dalam organisasi.

#### **A. Kajian pustaka**

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan penelitian.<sup>16</sup> Kajian pustaka ini ditujukan untuk mengetahui kesimpulan sementara yang diperoleh dari sumber yang ditemukan. Kesimpulan sementara ini kemudian dapat digunakan sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian.

Sejak akhir abad ke-19 terjadi perubahan kondisi sosial politik di Indonesia, yang berakibat pada munculnya kaum terpelajar Indonesia. Pembahasan ini dibahas menggunakan buku karangan Sartono Kartodirdjo yang berjudul *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid II: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Buku ini berisi tentang perkembangan sosial politik Indonesia sejak jaman kolonial hingga munculnya nasionalisme di Indonesia. Dalam salah satu babnya (hlm. 20-38) membahas mengenai kondisi sosial politik di Indonesia akhir abad ke-19, yang berakibat pada munculnya kaum terpelajar di Indonesia.

Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi bersifat nasional yang didirikan tahun 1908 di Belanda. Perkembangan awal organisasi PI dibahas menggunakan artikel karangan Akira Nagazumi yang berjudul *Masa Awal Pembentukan "Perhimpunan Indonesia": Kegiatan Mahasiswa di Negeri Belanda*,

---

<sup>10</sup>Sudiyo. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), hlm. 25.

<sup>11</sup> Dhont, Frank. *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>12</sup>Ingelson, John. *op.cit.*, hlm.79.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 80-82.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.96.

<sup>15</sup> Dhont, Frank. *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>16</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 2013), hlm.3.

1916-1917. Dimuat dalam Akira Nagazumi (ed.). Indonesia dalam Kajian sarjana Jepang: perubahan Sosial ekonomi Abad XIX-XX. Artikel ini membahas perkembangan awal PI terutama tahun 1917.

Perubahan PI dari organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik dibahas menggunakan buku karangan John Ingleson yang berjudul *Perhimpunan Indonesia and the Indonesian Nationalist Movement, 1923-1928*, dialih bahasakan oleh Nin Bakdisoemanto, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan. Buku karangan John Ingleson ini membahas perkembangan PI sejak menjadi organisasi politik hingga tahun 1930. Buku lainnya yang digunakan dalam pembahasan ini ialah buku karangan Frank Dhont berjudul *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*. Buku ini menjelaskan perkembangan nasionalisme PI dan organisasi yang memiliki hubungan dengan PI, karena penggerak organisasi tersebut adalah bekas anggota PI.

Pembahasan pengaruh PI terhadap pergerakan Indonesia menggunakan buku karangan John Ingleson yang dialih bahasakan oleh Zamakhsyari Dhofier berjudul *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Buku tersebut mengulas mengenai terbentuknya Nasionalisme hingga pelarangan terhadap organisasi Nasionalis serta penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh nasionalis. Tokoh nasionalis ini dahulunya merupakan tokoh yang tergabung dalam PI. Buku ini menjadi relevan dengan pembahasan pengaruh PI terhadap pergerakan nasional Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode sejarah kritis Kuntowijoyo, yang terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, serta (5) penulisan (historiografi).

### **1. Pemilihan topik**

Pemilihan topik ini didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>17</sup> Kedekatan emosional dapat diartikan sebagai kedekatan perasaan antara peneliti dengan objek yang akan diteliti. Sementara kedekatan intelektual ialah kedekatan yang didasarkan pada alasan-alasan ilmiah. Berdasarkan kedekatan emosional sebagai sesama warga negara Indonesia peneliti memilih topik pergerakan Indonesia. Peneliti mengambil topik pergerakan Indonesia dikarenakan sebagai seorang calon guru sejarah, peneliti haruslah mampu menguasai materi terutama sejarah Indonesia salah satunya ialah pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan Indonesia dipilih karena masa ini menjadi titik balik perjuangan bangsa Indonesia secara nasional bukan lagi kedaerahan. Masa pergerakan nasional juga merupakan masa yang penuh dengan gejolak yang menjadi fase pencarian identitas bangsa.

### **2. Heuristik (pengumpulan sumber)**

Dalam pengumpulan sumber peneliti mencari sumber berupa arsip, baik foto maupun dokumen, serta buku-buku yang relevan. Menurut urutan penyampaianya, sumber dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder.<sup>18</sup> Sumber primer merupakan sumber yang sejaman atau diperoleh dari tangan pertama. Sementara sumber sekunder ialah sumber yang diperoleh melalui tangan kedua atau bukan saksi mata peristiwa. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Otobiografi Mohammad Hatta dan Otobiografi Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo. Sementara sumber sekunder yang digunakan antara lain buku karangan Deliar Noer yang berjudul *Mohammad Hatta Biografi Politik*; buku karangan Frank Dhont berjudul *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*; dan buku karangan John Ingleson "Perhimpunan Indonesia and The Indonesian Nationalist Movement." Dialih bahasakan oleh Nin Bakdisoemanto. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan* ,

### **3. Verifikasi (kritik sumber)**

---

<sup>17</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tirta Wacana. 2013), hlm. 70.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

Verifikasi (kritik sumber) merupakan proses menilai dan mengkritik sumber juga dikenal sebagai kajian yang kritis terhadap sumber yang ada.<sup>19</sup> Verifikasi itu ada dua macam: autentisitas atau kritik ekstern dan kredibilitas atau kebiasaan yang dipercayai atau kritik intern.<sup>20</sup> Autentisitas (kritik ekstern) adalah kritik terhadap asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang atau tidak.<sup>21</sup> Kritik ekstern dilakukan dengan mengkaji kondisi fisik sumber. Kredibilitas (kritik intern) kedua kritik terhadap kebenaran isi dari sumber sejarah. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan atau menghubungkan sumber-sumber yang diperoleh.

#### **4. Interpretasi (penafsiran)**

Interpretasi atau penafsiran itu ada dua macam, yaitu: analisis dan sintesis.<sup>22</sup> Analisis merupakan proses menguraikan suatu sumber sejarah, karena sumber sejarah kadang memiliki beberapa kemungkinan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan sebuah fakta sejarah. Sedangkan sintesis merupakan proses penyatuan data-data sejarah yang paling dekat dengan fakta.

#### **5. Historiografi (penulisan)**

Historiografi (penulisan) merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah kritis Kuntowijoyo. Penulisan sejarah merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta yang ditemukan setelah melalui proses interpretasi menjadi sebuah karya sejarah. Penelitian ini menuliskan tentang Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi pergerakan yang revolusioner.

## **II. Pembahasan**

### **A. Latar Belakang Berdirinya Perhimpunan Indonesia**

#### **1. Kondisi Sosial Politik di Indonesia akhir Abad ke-19**

Sekitar akhir abad ke-19 Hindia Belanda memberlakukan Politik Pintu Terbuka yang memungkinkan para pemodal asing menanamkan investasinya di Hindia Belanda. Ekonomi Hindia Belanda tidak lagi menjadi monopoli pemerintah Belanda. Pengusaha-pengusaha swasta mengambil alih perusahaan-perusahaan perkebunan yang dahulunya diurus oleh pemerintah kolonial, dan cara mengurusnya tetap berjalan seperti sedia kala, bedanya dahulu hanya ada pemegang saham tunggal, sekarang jumlah pemegang sahamnya banyak.<sup>23</sup>

Undang-undang baru ditetapkan untuk melindungi negeri jajahan dari pemodal asing. Tahun 1870 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-undang Agraria. "Pengambilalihan tanah penduduk pribumi dilarang. Orang-orang asing diperbolehkan menyewa tanah pertanian dalam jangka waktu lima tahun."<sup>24</sup> Dalam hal sewa menyewa tanah pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-undang Sewa Tanah.

Meskipun Undang-undang Agraria melarang adanya pengambilalihan atas tanah, nyatanya cita-cita kemakmuran rakyat tidak tercapai. Undang-undang Agraria justru menimbulkan banyak masalah,

---

<sup>19</sup> Supardi. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. (Yogyakarta:Ombak. 2011), hlm. 27.

<sup>20</sup> Kuntowijoyo. *op.cit.*, hlm. 77.

<sup>21</sup> Helius Sjamsudin. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak. 2012), hlm. 105.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>23</sup> Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid II: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. (Jakarta: Gramedia.2014) hlm. 27.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

karena adanya dualisme hukum. Pemerintah mengaturnya dengan undang-undang Agraria sementara dalam masyarakat berlaku hukum adat.<sup>25</sup> Pelaksanaan Undang-undang Agraria diatur melalui *Agrarische Besluit* (Keputusan Agraria) yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa “semua tanah dimana seorang tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu *eigendomnya*, adalah tanah milik negara”.<sup>26</sup> Sementara itu tanah adat merupakan tanah milik bersama yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah, dan itu berarti semua tanah Indonesia merupakan milik pemerintah. Dengan demikian maka pemerintah memiliki hak penuh dalam mengusahakan tanah, termasuk menyewakannya kepada perusahaan asing.

Praktik penyewaan tanah terutama di Jawa tidak lantas menimbulkan pemusatan kekayaan dengan pesat dan membentuk kaum proletariat pedesaan, melainkan proses pembagian tanah dan harta penduduk secara merata.<sup>27</sup> Akibatnya harta yang diperoleh mereka semakin lama semakin sedikit, proses pembagian harta yang semacam itu yang disebut Geertz sebagai “kemiskinan bersama”. Meningkatnya lahan perkebunan berbanding lurus dengan ketersediaan tenaga kerja. Semakin luas tanah yang digarap maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Maka terjadilah suatu yang disebut sebagai involusi pertanian. Dalam teori involusi dinyatakan adanya suatu pola perubahan teknis dimana produksi pertanian ditingkatkan hanya dengan jalan meningkatkan masukan tenaga kerja ketiap bidang sawah.<sup>28</sup> Cara peningkatan hasil pertanian dengan memasukkan semakin banyak tenaga kerja, ternyata berdampak buruk bagi kesejahteraan penduduk. Disatu sisi metode involusi pertanian efektif dalam penanganan pengangguran karena peledakan penduduk. Disisi lainnya para pekerja harus berbagi upah dengan pekerja yang lain, oleh karena itu semakin sedikit upah yang mereka dapatkan.

## 2. Politik Etis

Perkembangan ekonomi di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang sangat pesat pada akhir abad ke 19. Sayangnya kemajuan ekonomi yang dialami Hindia Belanda berdampak pada penurunan kesejahteraan penduduknya. Bersamaan dengan kemajuan ekonomi, paham humanisme mulai muncul di Eropa. Selama perkembangan ekonomi ide-ide yang menyatakan bahwa kemakmuran penduduk pribumi Hindia Belanda telah merosot mulai dilancarkan.<sup>29</sup> Tuntutan-tuntutan mengenai usaha memajukan daerah jajahanpun bermunculan, terutama dari golongan sosialis dan etisi di Belanda.<sup>30</sup> Usaha-usaha perbaikan kesejahteraan terhadap penduduk pribumi, dikemudian hari dikenal sebagai Politik Etis. Politik Etis memiliki tiga program yaitu irigasi, emigrasi dan edukasi.<sup>31</sup> Politik Etis dilaksanakan berdasarkan pada pertanggungjawaban moral dalam politik dan praktik kolonial.<sup>32</sup>

---

<sup>25</sup>Mubyarto, dkk. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: kajian Sosial-Ekonomi*. (Yogyakarta: Aditya Media. 1992), hlm.37.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup> Hiroyosi Kano. “Sejarah Ekonomi Rakyat Pedesaan Jawa: Suatu Interpretasi”. Dalam Akira Nagazumi (ed). *Indonesia dalam Kajian Sejarah Jepang: perubahan Sosial Ekonomi abad XIX-XX dan Berbagai aspek Nasionalisme Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). hlm. 19.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>29</sup> Darmono (a.b.). “Politik Kolonial Belanda antara PD I-PD II”. *Lembaran Sejarah*. No. 1. T.V. 1967, hlm. 3-4.

<sup>30</sup> Sartono Kartodirdjo. *op.cit.*, hlm 38.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>32</sup> Darmono (a.b.). *op.cit.*, hlm. 3.

Meskipun Politik Etis ini memiliki dasar sebagai pertanggungjawaban moral namun, dalam pelaksanaannya terutama dikarenakan alasan ekonomi.

**a. Pelaksanaan Politik Etis dalam Bidang Irigasi.**

Efisiensi yang diperoleh dari adanya penemuan teknologi mendorong adanya perluasan lahan perkebunan. Meluasnya kawasan tanam ini berarti lebih banyak lagi desa masuk ke dalam jangkauan pabrik-pabrik dengan keharusan menyerahkan sebagian dari sawah mereka. Selain menyerahkan hak atas tanah mereka, petani juga harus memberikan hak atas air untuk kepentingan perkebunan.<sup>33</sup> Berdasarkan azas bahwa barang siapa menyewa tanah juga menerima hak pengairan, maka irigasi terutama digunakan untuk perkebunan. Karena tanah yang disewakan untuk perkebunan lebih luas maka kebutuhan pengairan untuk perkebunan lebih banyak daripada pengairan untuk sawah petani. Akibatnya petani mengalami kegagalan dalam menanam padi ataupun tanaman palawija.

**b. Pelaksanaan Politik Etis dalam Bidang Emigrasi.**

Pembukaan perkebunan untuk tanaman ekspor seperti kopi dan nila terutama dilakukan di Sumatera Timur. Pada saat itu, di Sumatera Timur tenaga kerja masih langka dan tidak sebanding dengan luas tanah yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera. Tenaga kerja tersebut terutama berasal dari Cina, India, Siam, dan Jawa.<sup>34</sup> Ide untuk mendatangkan pekerja dari luar daerah perkebunan ini diharapkan memiliki manfaat lebih, yakni mengurangi kepadatan penduduk di Jawa.

**c. Pelaksanaan Politik Etis dalam Bidang Edukasi**

Dalam bidang *edukasi* (pendidikan) berjalan dengan sangat *selektif* dan *diskriminatif*. Hanya anak-anak keturunan bangsawan yang mampu menempuh pendidikan Barat.<sup>35</sup> Alasan utama penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda bukanlah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia namun lebih karena alasan ekonomis. Pembukaan pabrik-pabrik pengolahan bahan perkebunan membutuhkan tenaga terdidik dengan harga murah. Mendatangkan tenaga kerja terdidik dari negeri Belanda tentu lebih mahal daripada tenaga kerja terdidik pribumi. Karenanya pemerintah Belanda terpaksa menyelenggarakan pendidikan bagi bangsa Indonesia untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan pun dilakukan seperlunya saja.

**3. Munculnya Kaum Terpelajar Indonesia**

Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memikirkan pendidikan bagi rakyat pribumi. Baru pada paruh kedua abad ke 19 pendidikan mulai diperhatikan. Tahun 1845 Gubernur Jendral J.C. Baud mengusulkan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi bangsawan pribumi.<sup>36</sup> Namun, sekolah bagi rakyat Indonesia baru benar-benar terbuka tahun 1864. Sejak awal pembukaan sekolah bagi bangsa Indonesia sekolah-sekolah gaya Barat berkembang sangat pesat. Krisis gula tahun 1885 mendorong pemerintah kolonial melakukan reorganisasi dalam bidang pendidikan. Tahun 1892 pemerintah Hindia Belanda membagi sekolah dalam dua kelompok. Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*) untuk calon pegawai dan Sekolah Kelas Dua (*Twede Klasse School*) untuk selain calon pegawai.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Jan Berman. *loc.cit.*

<sup>34</sup> Mubyarto, dkk. *op.cit.*, hlm. 117

<sup>35</sup> Sudiyo. *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>36</sup> Akira Nagazumi. *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>37</sup> Nasution. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1994), hlm. 49.

Melalui Sekolah Kelas Dua rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan sederhana, yaitu membaca, menulis dan berhitung. Meskipun lama pendidikannya hanya 3 tahun, namun Sekolah Kelas Dua memiliki kesempatan untuk mengembangkan pendidikannya. Melalui rekomendasi komisi sekolah dan persetujuan Inspektur Sekolah Kelas Dua dapat memperluas programnya.<sup>38</sup> Karena pengembangannya Sekolah Kelas Dua menjadi setara dengan Sekolah Kelas Satu.

Selain Sekolah Kelas satu dan Sekolah Kelas Dua terdapat satu sekolah khusus untuk orang Eropa dan keturunannya. *European Lagere School* (ELS) merupakan sekolah pertama yang didirikan di Hindia Belanda ditahun 1817.<sup>39</sup> Sekolah ini didirikan dengan mencontoh konsep dan kurikulum sekolah di Belanda. Pada perkembangannya murid yang masuk ELS kebanyakan adalah orang Indo.

Sejak berlakunya politik Liberal di Hindia Belanda, pendidikan menjadi hal yang paling diperhatikan. ELS bukan lagi sekolah yang hanya dikhususkan untuk orang Eropa, namun juga bagi orang Indonesia. Dengan berbagai macam syarat yang ditetapkan orang Indonesia diperbolehkan memasuki ELS. Untuk mengantisipasi semakin banyaknya orang Indonesia yang masuk ELS maka pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Hollandsche Inlandsche School* (HIS).

Tahun 1874, HBS mulai dibuka untuk anak Indonesia. Kesempatan ini tidak serta merta membuat anak Indonesia mendominasi HBS. Hal tersebut dikarenakan untuk memasuki HBS siswa harus lulusan dari ELS. Siswa lulusan HIS yang merupakan kesetaraan untuk ELS tidak dapat masuk HBS. Selain itu tingginya biaya pendidikan membuat banyak orang Indonesia tidak mampu menyekolahkan ke HBS.

Seiring bertambahnya orang Indonesia yang masuk sekolah, baik Sekolah Kelas Satu maupun Sekolah Kelas Dua maka kebutuhan akan tenaga pendidik semakin mendesak. Akhirnya pada tahun 1851 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Pendidikan Guru dan sekolah Dokter Jawa bagi rakyat Indonesia.<sup>40</sup> Sekolah ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan akan guru sekolah-sekolah Jawa dan tenaga medis.

Sekolah Dokter Jawa didirikan dengan tujuan untuk menyediakan juru kesehatan yang memiliki kualifikasi untuk mencacar (kemudian diubah menjadi mantri cacar).<sup>41</sup> Sekolah Dokter Jawa ini berkembang dengan pesat kemudian diubah menjadi *School tot Opleiding van Inlandsch Artsen* (STOVIA). Pelajar yang masuk kedalam STOVIA pun menjadi beragam tidak hanya berasal dari Jawa saja. Selain jumlah muridnya yang semakin banyak pelajaran yang diberikan pun semakin meingkat. Lulusan STOVIA kemudian tidak lagi bergelar dokter Jawa, namun diubah menjadi *Inlandsch Art* (Dokter Bumi Putra).<sup>42</sup>

Sementara sekolah yang didirikan semakin banyak, pendidikan tinggi setingkat universitas baru didirikan sekitar tahun 1920-an. Untuk melanjutkan pendidikan tinggi pemuda Indonesia harus keluar negeri terutama Belanda. Namun, biaya yang sangat mahal membuat sebagian besar lulusan tidak mampu meneruskan pendidikan tinggi. Meski demikian ada beberapa golongan bangsawan dan pengusaha kaya yang menyekolahkan anaknya ke Belanda. Jumlah mereka yang melanjutkan pendidikan Tinggi di Belanda sangat sedikit. Tercatat hanya ada 5 mahasiswa pada tahun 1900 dan bertambah

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>39</sup> Djohan Makmur, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. (Jakarta: Manggala Bhakti. 1993), hlm.60.

<sup>40</sup> Sugiman. *Pengaruh Politik Ethis Dibidang Perkembangan Pendidikan Di Indonesia*. (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1968), hlm.56

<sup>41</sup> Sudiyo. *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>42</sup> *Ibid.*



menjadi 23 di tahun 1908.<sup>43</sup> Menjadi minoritas di negeri orang, mendorong mahasiswa Indonesia untuk saling berkumpul. Perkumpulan mahasiswa ini semakin lama semakin banyak anggotanya, sehingga pada tahun 1908 didirikanlah sebuah perkumpulan bernama *Indische Vereeniging*.<sup>44</sup>

## **B. Perkembangan Awal Perhimpunan Indonesia Tahun 1908-1922**

### **1. Masa Organisasi Berkelompok dan Perubahan Orientasi**

Pada awal abad ke-20 pelajar Indonesia yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi sangat sedikit. Hanya mereka yang memiliki biaya atau mendapat beasiswa karena menjadi lulusan terbaik *Algemene Middelbare School* (AMS) berkesempatan meneruskan pendidikan tinggi di Belanda. Selain itu Indonesia tidak memiliki satupun sekolah tinggi. Rasa senasib sepenanggungan sebagai mahasiswa di perantauan jauh dari sanak famili dan keluarga mendorong mereka mendirikan perkumpulan. Oleh karena itu, pada tahun 1908 didirikan organisasi *Indische Vereeniging* oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda.<sup>45</sup> Noto Soeroto dan Sutan Kasayangan menjadi pelopor pendirian organisasi tersebut.

Awalnya *Indische Vereeniging* bukan merupakan organisasi politik, hanya sebuah perkumpulan sosial tempat para mahasiswa melewatkan waktu senggangnya.<sup>46</sup> Meski berawal dari sebuah perkumpulan sederhana pendirian *Indische Vereeniging* ini memiliki arti penting. Pertama, *Indische Vereeniging* membuka pintu keanggotaan bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda.<sup>47</sup> Kedua, *Indische Vereeniging* bukanlah perkumpulan biasa, karena dalam pasal kedua Anggaran Dasar *Indische Vereeniging* jelas disebutkan: “memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari *Indiers* di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda”.<sup>48</sup>

Tidak banyak yang diketahui publik tentang kegiatan yang dilakukan *Indische Vereeniging* pada masa awal berdirinya. Melalui buku kenangan *Indische Vereeniging* yang diterbitkan tahun 1923 diketahui kegiatan *Indische Vereeniging* masa awal mencakup dua ceramah oleh Noto Soeroto, berjudul: “Gagasan R.A Kartini sebagai Pedoman *Indische Vereeniging*” dan “Persatuan Hindia dan Nederland”; serta ceramah dari Dr. Apituley berjudul “ Pendidikan Higiene untuk Hindia Belanda”.<sup>49</sup> Dilihat dari judul pidato yang dibawakan oleh Noto Soeroto dan Dr. Apituley, kegiatan *Indische Vereeniging* masa awal jauh dari revolusioner.

Di bawah kepemimpinan Noto Soeroto PI menganut politik asosiasi, yang menekankan kerja sama antara pemerintah kolonial dan bangsa Indonesia. Kerjasama antara golongan penjajah dan golongan terjajah mau tidak mau mengandung pengertian kelangsungan penjajahan. Justru itulah yang ditentang oleh kaum nasionalis tulen.<sup>50</sup> Noto Soeroto menghargai perkembangan nasionalisme dengan

---

<sup>43</sup> Akira Nagazumi. *op.cit.*, hlm. 136.

<sup>44</sup> Ingleson, John. *loc.cit.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Akira Nagazumi. *loc.cit.*

<sup>48</sup> *Ibid.* Lihat juga dalam Sudiyo. *Perhimpunan Indonesia*. (Jakarta: Bina Adiaksara. 2004), hlm. 24. Dan Ingleson, John. “Perhimpunan Indonesia and The Indonesian Nationalist Movement.” A.b. Nin Bakdisoemanto. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta: Temprint.1993), hlm. 1

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>50</sup> Slametmuljana. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1969), hlm. 112.

gagasan merdeka sepenuhnya, namun, dia tetap pesimis akan keberhasilannya. Hidup di negeri Belanda telah mengubah pandangannya mengenai Belanda. Hidup dalam negeri yang merdeka membuatnya berfikir bahwa orang Belanda tidaklah jahat.

Sementara itu orang Belanda di Indonesia jauh berbeda dengan yang berada di negeri Belanda. Orang-orang Belanda di Indonesia dikenal sebagai penjajah, penguasa yang mengeksploitasi bangsa Indonesia. Mereka juga berlaku sangat tidak adil, terutama dalam bidang pendidikan. Pemerintah kolonial sangat membatasi pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pendidikan bagi bangsa Indonesia diselenggarakan hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi pegawai rendah pemerintahan. Orang-orang yang dapat mengikuti pendidikan pun hanya kaum bangsawan, rakyat biasa tidak diijinkan.

Meskipun pada awalnya pendidikan hanya diselenggarakan bagi golongan bangsawan dan sangat terbatas. Bagaimana pun masuknya pendidikan Barat menjadi semangat baru bagi bangsa Indonesia. Pendidikan yang diberikan telah menyadarkan bangsa Indonesia akan ketidakadilan, penjajahan, dan eksploitasi yang melanggar hak-hak kemanusiaan.<sup>51</sup> Berawal dari kesadaran tersebut munculah rasa harga diri dan nasionalisme.<sup>52</sup> Munculnya semangat nasionalisme dalam diri kaum terpelajar Indonesia mendorong mereka untuk melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut diwujudkan dengan mendirikan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial-budaya pada tahun 1908 bernama Budi Utomo (BU). BU didirikan dengan tujuan untuk memajukan pengajaran bagi orang Jawa dan menghidupkan kembali budaya Jawa.<sup>53</sup> Dari tujuannya telah tercermin adanya semangat nasionalisme kedaerahan yang dinyatakan dengan menghidupkan kembali budaya Jawa.

Akan tetapi perjuangan BU dianggap terlalu lamban bagi sebagian anggota BU. Tjipto Mangoenkoesoemo misalnya, ia memutuskan keluar dari BU karena tidak sabar mengikuti perjuangan BU. Tidak lama setelah ia keluar dari BU bersama Doves Dekker dan Suardi Suryaningrat kemudian mendirikan *Indische Partij* (IP) tahun 1912. Tujuan didirikannya IP ialah “untuk membangun patriotisme Bangsa Hindia kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup, dan menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan guna memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka”.<sup>54</sup> Karena tujuannya yang bersifat politis dan radikal IP tidak berumur panjang. Tanggal 4 Maret 1913, IP dinyatakan sebagai partai terlarang dan ketiga pimpinannya diasingkan ke Belanda.

## **2. Semangat Nasionalisme dalam Perhimpunan Indonesia dan Perubahan Nama**

Tidak lama setelah Tiga Serangkai tiba di Belanda, mereka kemudian masuk dalam *Indische Vereeniging*. Bergabungnya Tiga Serangkai ke dalam *Indische Vereeniging* menimbulkan berbagai pertentangan di antara anggota *Indische Vereeniging*. Pertentangan antara ide asosiasi yang dibawa oleh Noto Soeroto dan ide nasionalisme yang dibawa IP menjadi bahan perdebatan. Noto Soeroto beranggapan bahwa Hindia Belanda memerlukan perlindungan militer dari Pemerintah Kolonial Belanda. Bagi Tiga Serangkai terutama Doves Dekker dan Tjipto ide-ide asosiasi yang dibawa oleh Noto Soeroto tidak bisa diterima. Menurut mereka Indonesia membutuhkan penghormatan yang lebih dari itu.<sup>55</sup> Indonesia tidak membutuhkan perlindungan militer dari pemerintah Kolonial Belanda. Indonesia membutuhkan kemerdekaan yang terutama dalam bidang pendidikan dan partisipasi politik.

---

<sup>51</sup> Sudiyo. *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>53</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>55</sup> Madeleon Djajadiningrat-Nieuwenhuis. “Noto Soeroto: His Ideas and the Late Colonial Intellectual Climate”, *Indonesia*, [Tanpa Volume], No. 55. 1993 hlm. 50.

Semangat jaman yang mulai berubah mampu mengubah pandangan *Indische Vereeniging* tentang pemerintah Belanda sebagai pelindung Hindia Belanda. Ide nasionalis yang dibawa oleh Suwardi juga mampu menumbuhkan keinginan untuk mengadakan publikasi. Tahun 1916 terbitlah majalah berkala Hindia Poetra. Meski pemimpin redaksi yang pertama yaitu Suwardi menolak bahwa Hindia Poetra digunakan sebagai perjuangan politik, namun secara jelas ia menyatakan bahwa penerbitan tersebut ditujukan untuk menarik minat pembaca secara luas.<sup>56</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebingungan antara keinginan untuk mengenalkan Indonesia dan ketakutan adanya pelarangan *Indische Vereeniging*. Ketakutan tersebut dapat dipahami sebagai trauma yang dihadapinya saat menjadi pemimpin IP. Pelarangan terhadap IP bahkan sebelum organisasi tersebut dikenal luas di negerinya, membuat Soewardi berhati-hati.

Secara umum penerbitan Hindia Poetra disambut dengan gembira meski masih menimbulkan protes dari berbagai kalangan progresif. Ide “perkembangan yang selaras” Suwardi dianggap terlalu munafik bagi kaum progresif. Berbeda dengan para pemimpin *Indische Vereeniging* yang secara sadar menginsyafi bahwa mahasiswa Indonesia dinegeri Belanda jumlahnya sangat sedikit dan mereka belum siap untuk melakukan konfrontasi. Banyaknya anggota organisasi yang moderat dan berpandangan tradisional juga menghambat perjuangan secara progresif. Ide semangat kebersamaan yang muncul karena pengaruh nasionalisme Suwardi merupakan pencapaian yang baik. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh nasionalisme yang dibawa oleh pemimpin IP telah mampu membelokkan pandangan anggota *Indische Vereeniging* kearah yang lebih nasionalis.

Suwardi dan pemimpin *Indische Vereeniging* lainnya memahami ketidaksiapan *Indische Vereeniging* untuk melakukan konfrontasi. Suwardi menginsyafi perjuangan politik seperti yang dilakukan IP tidak akan berhasil. Perjuangan politik yang radikal tanpa suatu tujuan bersama serta masa yang cukup dan kompak hanya akan menjadi sia-sia. Selain jumlahnya yang kecil para pemimpin *Indische Vereeniging* menyadari bahwa mereka memerlukan senjata dan lebih penting lagi sebuah cita-cita bersama. Mereka sadar *Indische Vereeniging* masih membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menjadi siap melaksanakan tujuan politik.

Tanggal 14 April 1917, PI mengadakan pertemuan dengan partai politik Indonesia seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo di Belanda. Karena pertemuan tersebut melibatkan partai politik maka sebagian besar diskusi mengandung unsur politis. Terdapat sebuah fakta menarik yaitu digunakannya kata *Indonesie* (Indonesia) dan *Indonesiers* (orang Indonesia) oleh Soerjopoetro selama pertemuan berlangsung. Laporan ini secara jelas dituliskan dalam majalah Hindia Poetra No. 9 tahun 1917.<sup>57</sup> Kemudian kata tersebut menjadi populer di kalangan mahasiswa sebagai kata pengganti *Indie* (Hindia) dan *Indiers* (orang Hindia) yang sangat merendahkan kedudukan orang Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1922, organisasi tersebut berubah menjadi *Indonesische Vereeniging*. Dengan demikian penggunaan kata Indonesia secara politis mulai dipakai sejak tahun 1922, untuk menggantikan nama ‘Hindia Belanda’.<sup>58</sup>

Sejak berubahnya nama *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* tahun 1922, organisasi *Indonesische Vereeniging* semakin berhaluan politik. Untuk pertama kali kata *Indonesische* dimaknai secara politis. Penggunaan nama Indonesia memiliki arti penting. Pertama, untuk menunjukkan identitas bangsa, bahwa disuatu tempat di atas muka bumi ini ada sebuah bangsa

---

<sup>56</sup> Akira Nagazumi. *op.cit*, hlm. 142.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>58</sup> Djaka Soetapa. *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam Al-qur’an*. (Yogyakarta: Duta Wacana University Press. 1990), hlm. 186.

bernama Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri, tidak dapat disamakan dengan kepribadian bangsa Belanda. Ketiga, kata Indonesia menunjukkan tujuan ke arah pembentukan negara nasional yang lebih tegas.

### C. Perubahan dari Organisasi Mahasiswa Menjadi Organisasi Politik 1922-1930

#### 1. Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia (PI)

Bergabungnya generasi 1920-an kedalam *Indische Vereeniging* mendorong terjadinya perubahan orientasi dalam organisasi. Pemikiran mengenai tujuan, lambang organisasi dan anggaran dasar mulai dirumuskan. Di bawah kepemimpinan Herman Kartowisastro nama *Indische Vereeniging* diganti menjadi *Indonesische Vereeniging*. Juga disetujui lambang organisasi ialah menggunakan warna merah putih dengan tambahan gambar kerbau.

Lambang organisasi *Indonesische Vereeniging* ini memiliki arti dan filosofi yang sangat mendalam dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Warna merah memiliki arti sebagai lambang keberanian dan warna putih merupakan lambang kesucian. Sementara kepala kerbau merupakan lambang dari kesabaran, ketabahan dan keberanian orang Indonesia.<sup>59</sup>

Berlakunya nama *Indonesische Vereeniging* membuat mahasiswa Hindia Belanda di Belanda tidak mau disamakan dengan bangsa lain. Muncul masalah tentang penyebutan nama bagi orang Hindia Belanda. Sebutan *Nederlandsch-Indie* dan *Insulinde* dianggap tidak tepat dan merendahkan martabat. Kemudian Darmawan Mangunkusomo mengusulkan nama "Indonesia" untuk menggantikan sebutan *Nederlandsch-Indie*.<sup>60</sup> Nama tersebut tentu menarik perhatian banyak orang, hingga dalam rapat umum tanggal 19 Februari 1922 diputuskan untuk menggunakan nama "Indonesia" untuk menyebut seluruh kawasan Hindia Belanda.<sup>61</sup> Sementara orangnya disebut dengan bangsa Indonesia.

Sejak tahun 1923 di bawah kepemimpinan Iwa Kusumasumantri anggaran dasar organisasi mulai dirumuskan. Tuntutan kemerdekaan Indonesia mulai gencar dikumandangkan. Kemudian pada pergantian pengurus tahun 1925 Mr. Sukiman Wiryosandjono mengemukakan anggaran dasar *Indonesische Vereeniging*. Anggaran dasar tersebut menjadi pokok dasar taktik dan strategi pergerakan kemerdekaan nasional hingga terjadinya perang pasifik.<sup>62</sup> Anggaran dasar yang dikemukakan ialah sebagai berikut.

1. Hanya satu Indonesia yang merasa bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama, yaitu memerdekakan Indonesia, menghendaki adanya suatu aksi massa nasional yang insyaf dan berdasar pada kekuatan sendiri.
2. Ikut sertanya segala lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bersama ini adalah juga suatu syarat mutlak untuk mencapai tujuan itu.
3. Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik kolonial ialah pertentangan kepentingan antara si penjajah dan si terjajah. Corak politik si penjajah untuk mengaburkan dan menutupi anasir itu harus dibahas oleh si terjajah dengan mempertajam dan menyatakan dengan jelas pertentangan tersebut.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>60</sup> Mohammad Hatta. *Untuk Negeriku Jilid I: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Kompas. 2011), hlm. 166.

<sup>61</sup> Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo. *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Gunung Agung. 1978), hlm. 120.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

4. Kerena penjajahan pengaruhnya merusak dan menimbulkan demoralisasi atas keadaan jiwa fisik bangsa Indonesia, maka harus dikerjakan sungguh-sungguh usaha menormalisasi perhubungan jiwa dan materiil.<sup>63</sup>

Penerbitan anggaran dasar tersebut menunjukkan bahwa *Indonesische Vereeniging* yang kemudian resmi berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) tahun 1925 memiliki arah dan tujuan yang tegas. Anggaran dasar PI tersebut dikemudian hari menjadi landasan perjuangan nasional bagi bangsa Indonesia.

## **2. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia (PI)**

### **a. Hubungan dengan Komunis**

Hubungan PI dengan komunis telah dilaksanakan sejak tahun 1913 meski tidak secara intensif. Baru ketika Hatta menjadi ketua PI hubungan antara PI dengan komunis semakin erat. Darsono dan Semaun yang diasingkan dari Hindia Belanda bahkan menjadi anggota PI dan sering mengikuti rapat PI. Bahkan untuk memperkenalkan ideologi PI kepada Komintern, PI mengirimkan Semaun dan Iwa Kusumasumantri untuk mewakili PI dalam Komintern.<sup>64</sup> Meski hanya dalam waktu singkat yaitu sejak 8 Nopember 1925 hingga 1926.

Pada waktu Hatta sebagai pemimpin, PI tidak menganggap orang-orang komunis merupakan musuh bagi kaum nasionalis. Anggapan ini sangat beralasan. Pertama, orang-orang komunis Indonesia seperti Tan Malaka, Darsono dan Semaun memiliki tujuan yang sama yaitu Indonesia merdeka. Hal tersebut yang kemudian oleh Hatta disebut sebagai golongan nasionalis terselubung.<sup>65</sup> Kedua, orang-orang komunis Indonesia tersebut tidak tunduk terhadap Stalin. Tan Malaka tidak mau tunduk terhadap kediktatoran Stalin, ia memiliki pandangan sendiri mengenai komunis. Menurut Tan Malaka komunisme sebagaimana yang dipahaminya ialah demokrasi yang sebenarnya bukan diktator orang-seorang.<sup>66</sup> Ketiga, karena Moscow pada tahun 1925 menyatakan dukungannya kepada gerakan nasionalis revolusioner.

Tahun 1926 Hatta bertemu dengan Semaun, seorang komunis Indonesia yang diangkat menjadi anggota Komintern. Hatta dan Semaun mendiskusikan mengenai pemberontakan PKI yang gagal dan mereka setuju untuk mendirikan partai baru untuk menggantikan PKI. Selain itu pertemuan tersebut juga menghasilkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai "Konvensi Hatta-Semaun".

Konvensi Hatta-Semaun tersebut berdampak pada pemecatan Semaun dari Partai Komunis dan Komintern. Rupanya konvensi tersebut dibuat secara pribadi oleh keduanya dan dirahasiakan dari Komintern. Oleh karena itu, ketika Stalin mendengar tentang isi konvensi tersebut menjadi marah. Stalin memerintahkan Semaun untuk membatalkan konvensi dan meminta maaf kepada Komintern secara terbuka melalui pers Internasional. Sejak itu hubungan PI dengan komunis semakin merenggang.

Pasca penangkapan pemimpin PI tahun 1927, komunis baru mulai melakukan usaha untuk menguasai PI. *Communistische Partij Nederland* (CPN) mulai menanamkan pengaruh terhadap PI. Orang pertama yang berhasil dipengarui ialah Abdulmadjid, anak tiri R.A. Kartini.<sup>67</sup> Ia kemudian menggantikan

---

<sup>63</sup> Mohammad Hatta. *op.cit.*, hlm. 225-225. Juga dalam Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo. *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Gunung Agung. 1978), hlm.124. dan Dhont, Frank. *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*. (Yogyakarta: UGM Press. 2005), hlm. 53-54.

<sup>64</sup> Ingleson, John. *op.cit.*, hlm.48.

<sup>65</sup> Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>66</sup> Mohammad Hatta. *op.cit.*, hlm. 183.

<sup>67</sup> Ong Hok Ham. *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. (Yogyakarta: Bentang. 2005), hlm. 29.

Hatta sebagai ketua PI. Sejak saat itu PI tidak memiliki arti yang penting kecuali sebagai organisasi yang digunakan untuk kepentingan komunis. Mahasiswa lain yang terpengaruh komunis ialah Setiajid, Rustam Effendy, Sunito, Sidartawan, Maruto Darusman, Soeripno, Djajengpratomo, Gondoprato (adik Djajengpratomo), dan Jusuf Muda Dalam.<sup>68</sup>

#### **b. Berjuang dalam Liga Internasional**

Dalam rangka mengenalkan bangsa Indonesia kekancah Internasional, PI semakin intensif mengadakan hubungan dengan mahasiswa Indonesia di Eropa sejak tahun 1926. Arnold Mononutu dikirim ke Paris sebagai delegasi PI. Tugasnya ialah mengadakan hubungan dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara terjajah di Asia-Afrika dan membicarakan keadaan-keadaan di negara masing-masing mengenai pergerakan nasional serta memberikan laporan kepada PI.<sup>69</sup> Berkat usaha Arnold Mononutu PI berhasil mengadakan hubungan dengan mahasiswa Asia yang berada di Paris. Antara lain Doung Van Giauw, seorang pengacara asal Annam, Topchybashi asal Aserbaijan, Tung Mo asal Tiongkok, dan K.M. Panikkar dari India.<sup>70</sup> Keberhasilan lainnya ialah turut sertanya PI dalam Kongres Demokrasi Internasional di Bierville. Dalam kongres tersebut Hatta berhasil mendapatkan pengakuan atas Indonesia bukan Hindia Belanda, jadi dalam diskusi selama sidang sebutan Indonesia yang digunakan.<sup>71</sup> Pengakuan tersebut menjadi kemenangan dari bangsa Indonesia atas Belanda dalam kongres.

Tanggal 10-15 Februari 1927, Hatta bersama Nazir Pamuntjak, Ahmad Subardjo, Gatot Tarunomihardjo, Abdul Manaf (mahasiswa Indonesia di Mesir), dan Semaun (mewakili kaum komunis Indonesia) menghadiri Kongres Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussel.<sup>72</sup> Dalam kongres tersebut Hatta dan Semaun ditempatkan dalam presidium kongres. Di akhir kongres disepakati untuk menjadikan kongres tersebut sebuah Liga Internasional bernama *League against Imperialisme and for National Independence* (Liga Menentang Imperialisme dan untuk Kemerdekaan Nasional).<sup>73</sup> Juga disetujui permohonan kepada Pemerintah Belanda untuk membentuk sebuah komite penyelidikan terhadap pemberontakan PKI tahun 1926-1927.

Sekembalinya Hatta ke Belanda, PI mendapat undangan dalam kongres Liga Wanita Internasional. Kongres tersebut akan dilaksanakan pada 10 September 1927 di Gland, Geneva, Swiss dengan tema *L'Indonesie et son Probleme de l'Independence* (Indonesia dan Masalah Kemerdekaannya).<sup>74</sup> Dari judul kongres tersebut dapat disimpulkan bahwa PI telah berhasil dalam menarik perhatian Internasional terhadap masalah kemerdekaan Indonesia. Tokoh lain yang turut serta dalam kongres ialah Nyonya Henriette Roland Holst, dari Belanda dan Jawaharlal Nehru dari India. Sebelumnya pada kongres di Brussel Jawaharlal Nehru juga turut serta.

Tanggal 27 September 1927 sekembalinya Hatta dari kongres Liga Wanita Internasional ia ditangkap bersama tiga pemimpin PI lainnya. Mereka adalah Nazir Pamuntjak, Ali Sastroamijoyo dan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm.30-31.

<sup>69</sup> Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo. *op.cit.*, hlm. 149.

<sup>70</sup> Mohammad Hatta. *op.cit.*, hlm. 262.

<sup>71</sup> Deliar Noer. *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>72</sup> Mohammad Hatta. *op.cit.*, hlm. 58. Dalam otobiografi Ahmad Subardjo, Abdul Manaf tidak disebutkan.

<sup>73</sup> Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo. *op.cit.*, hlm. 132.

<sup>74</sup> Mohammad Hatta. *op.cit.*, hlm. 281.

Abdul Majid. Sebenarnya Ahmad Subardjo, Arnold Mononutu dan Gatot Tarunomihardjo juga masuk dalam daftar yang akan ditangkap, namun karena berada di luar negeri polisi Belanda tidak dapat menangkap mereka.<sup>75</sup> Mereka dituduh berusaha menggulingkan pemerintah Belanda,<sup>76</sup> namun tuduhan tersebut tidak terbukti dan mereka dibebaskan tahun 1928.

### c. Propaganda ke Tanah Air

Sejak tahun 1923 PI telah aktif dalam memelopori perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1925 PI mulai meluaskan pengaruhnya ke tanah air. Melalui anggotanya yang telah selesai melaksanakan studi dan kembali ke tanah air, PI mulai mempropagandakan manifesto politiknya. Alumni PI dianjurkan untuk segera menggabungkan diri pada organisasi pergerakan yang telah terbentuk di Indonesia. Namun, usaha tersebut tidak berhasil karena sebagian besar anggota organisasi pergerakan di Indonesia sangat moderat.

Dengan demikian maka PI mulai mengubah strategi propagandanya. Hatta menganjurkan untuk membentuk suatu organisasi baru yang berhaluan nasionalis yang mampu meneruskan propaganda PI. Seorang alumni PI yaitu Sutomo yang kembali ke Indonesia tahun 1923 mendirikan *Indonesische Studieclub* tanggal 11 Juli 1924 di Surabaya.<sup>77</sup> Tujuan didirikan Studieclub tersebut ialah untuk mengumpulkan para kaum terpelajar Indonesia untuk mencapai suatu kesadaran komunitas dan pengertian politik.<sup>78</sup> Terdapat satu Studieclub lagi yang didirikan di Bandung tanggal 29 November 1925, bernama *Algemeene Studieclub*. Tujuan didirikannya Studieclub tersebut ialah untuk meneliti mengenai Indonesia dan topik Internasional guna mencapai suatu partai politik yang bisa menerapkan ide tersebut.<sup>79</sup> Berdasarkan tujuan didirikannya *Algemeene Studieclub* tentu lebih bersifat politis dibanding *Indonesische Studieclub*. Sejak tahun 1926 organisasi *Algemeene Studieclub* mulai menerbitkan majalah Indonesia Muda, sebagai sarana propaganda. Kemudian pada tahun 1927 atas prakarsa Soekarno sebagai pemimpin *Algemeene Studieclub* yang berjasama dengan Hatta dari PI mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI).

#### 1. Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)

Akibat dari pemberontakan PKI yang gagal tahun 1926-1927 sangat merugikan kaum pergerakan Indonesia. Indonesia kehilangan banyak sekali orang-orang pergerakan karena mereka dibuang ke Boven Digoel. Pasca pemberontakan PKI yang gagal pada tahun 1926-1927, pergerakan kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan arah ideologi. Hancurnya kekuatan besar PKI di Hindia Belanda membuat golongan nasionalisme memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Akibat lain ialah timbulnya keinsyafan di antara kaum pergerakan bahwa konfrontasi dengan pemerintah Hindia Belanda adalah sia-sia. Gerakan semacam itu dengan mudah akan dihancurkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Atas dasar pemikiran tersebut maka tanggal 4 Juli 1927 dibentuklah Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia didirikan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia dalam segala bidang.<sup>80</sup> Pada Mei 1928 Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 288

<sup>76</sup> Ingleson, John. *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>77</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>78</sup> Dhont, Frank. *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>80</sup> Anonim. "Azas dan Daftar Oesaha P.N.I". *Soeloeh Ra'jat Indonesia*. No. 15. Tahun ke-2. 11 April 1928. hlm. 107.

Indonesia (PNI).<sup>81</sup> PNI menjadi organisasi pergerakan baru berazas nasionalis yang membuka keanggotaan bagi seluruh etnis, golongan, agama, termasuk golongan komunis. Selain itu PNI juga mengadopsi azas yang digunakan PI yaitu non-kooperasi, swadaya, kesatuan nasional, dan solidaritas. Prinsip non-kooperasi berarti tidak bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam memperoleh kemerdekaan. Akan tetapi prinsip non-kooperasi dibentuk bukan dengan alasan kebencian, melainkan berdasarkan usaha menemukan kembali jati diri dan kekuatan sendiri.<sup>82</sup> Azas swadaya, menolong diri sendiri dengan bekerja untuk menguatkan dan membangun bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan bersama.<sup>83</sup> PNI akan bekerjasama dan mendukung perhimpunan-perhimpunan yang memiliki maksud dan tujuan sama sebagai wujud kesatuan dan solidaritas bersama, serta akan meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia lainnya.<sup>84</sup>

PNI sebagai organisasi pergerakan yang non-koopersi telah mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda sejak awal berdirinya. *Algemeene Recherche Dienst* (ARD), sebagai organisasi intelejen politik selalu turut serta dalam rapat-rapat PNI. ARD bertugas terutama untuk mengawasi jalannya rapat. Jika dalam rapat PNI digunakan kata merdeka, revolusi, dan penindasan maka ARD berhak menghentikan rapat atau bahkan membubarkan paksa.<sup>85</sup> Selain pengawasan ketat oleh ARD pemerintah juga melarang pejabat pemerintah baik sipil maupun militer untuk bergabung dengan PNI. Jika larangan tersebut tidak diindahkan maka pegawai yang bersangkutan akan dipecat dari jabatannya dalam pemerintahan.

Sebagai tindak pencegahan terhadap perkembangan PNI serta popularitas Soekarno pemerintah Hindia Belanda melakukan pengeledaghan di kantor-kantor PNI serta penangkapan terhadap pemimpin PNI pada tanggal 29 Desember 1929.<sup>86</sup> Para pemimpin yang ditangkap tersebut yaitu Soekarno, Maskoen, Gatot Mangkoeprodjo dan Supriadinata. Mereka ditangkap atas tuduhan melakukan propaganda dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam persidangan Soekarno melakukan pembelaanya yang dikenal dengan judul "Indonesia Menggugat". Isi pidato pembelaan tersebut ialah tentang sifat dan watak kolonial Belanda yang eksploitatif. Tanggal 22 Desember 1930 keputusan hukuman bagi keempat pemimpin PNI dibacakan. Soekarno dihukum penjara 4 tahun, Gatot Mangkoeprodjo 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Supriadinata 1 tahun 3 bulan.<sup>87</sup> Dengan dipenjaranya keempat pemimpin PNI maka pengurus besar PNI memutuskan pembubaran PNI pada tahun 1931.

Pembubaran PNI sangat berpengaruh bagi pergerakan Indonesia. Sebagai organisasi non-kooperatif dan revolusioner PNI telah tumbuh lebih besar dan lebih kuat dari PKI. Pembubaran PNI sangat mengguncang bagi kaum pergerakan nasionalis. Akibatnya perjuangan pergerakan Indonesia terpecah menjadi dua haluan politik kooperatif dan non-kooperatif. Kemudian pada 1 Mei 1931 muncul

---

<sup>81</sup> Allan Akbar. *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>83</sup> Ingleson, John. *op.cit.*, hlm.16.

<sup>84</sup> Anonim. "Maksoed dan Toejoeanja P.N.I.". *Soeloeh Ra'jat Indonesia*. No. 7. Tahun ke-2. 15 April 1928, hlm. 28.

<sup>85</sup> Allan Akbar. *op.cit.* hlm. 86.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>87</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 71.



Partai Indonesia (Partindo) sebagai penerus PNI dengan Sartono sebagai ketuanya.<sup>88</sup> Namun Partindo tidak sama halnya dengan PNI, Partindo lebih menekankan pada swadaya, koperasi dan swadesi.<sup>89</sup> Pembubaran PNI dan pembentukan Partindo yang berlainan haluan dengan PNI mengakibatkan kekecewaan dari Hatta dan Syahrir. Akhirnya pada Desember 1931 Hatta dan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan PNI-Baru.<sup>90</sup> Organisasi ini didirikan dengan tujuan menyiapkan kader-kader nasionalis bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan.

## 2. Pengaruh PI Terhadap Pergerakan Indonesia

Pengaruh PI terlihat pada banyaknya partai politik yang berdiri sekitar tahun 1920-an. Terbentuknya banyak partai politik dinilai hanya akan melemahkan gerakan nasionalis. Banyaknya partai yang mengejar kepentingan mereka sendiri berdampak pada terabaikannya perhatian terhadap pergerakan sebagai suatu kesatuan.<sup>91</sup> Keadaan tersebut memunculkan suatu ide perlunya diselenggarakan suatu Kongres Indonesia yang menaungi seluruh partai yang ada. Berkat kerjasama antara Soekarno dan Sukiman dari PSI maka pada tanggal 17-18 Desember 1927 diselenggarakan sebuah kongres di Bandung. Yang terlibat dalam kongres tersebut yaitu, PSI, BU, PNI, Pasundan, *Sumatranenbond*, kaum Betawi dan Kelompok Studi Indonesia.<sup>92</sup> Dalam kongres tersebut disepakati berdirinya sebuah federasi dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Dalam anggaran dasar organisasi dinyatakan bahwa federasi tersebut merupakan suatu badan federasi yang tidak membawahi partai-partai politik yang ada, mereka tetap akan bergerak secara bebas, dan bahwa federasi tersebut hanya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dimufakati bersama sebelumnya.<sup>93</sup>

Bersamaan dengan usaha pembentukan PNI dan PPPKI, para pemuda mulai menggabungkan diri dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan tahun 1926.<sup>94</sup> PPPI mencita-citakan sebuah persatuan di antara pemuda-pemuda Indonesia dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan kedaerahan. Puncak dari gerakan pemuda nasionalis terjadi pada Kongres Pemuda II tanggal 26-28 Oktober 1928.<sup>95</sup> Kongres tersebut dihadiri oleh 9 organisasi pemuda terkemuka serta dihadiri oleh tokoh politik yang berpengaruh seperti Sukarni, Sartono, dan Sunarjo.<sup>96</sup> Kongres Pemuda II ini menghasilkan semangat baru ketinggian nasionalisme yang lebih tinggi dengan diucapkannya sumpah setia oleh para utusan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

---

<sup>88</sup> Allan Akbar. *op.cit.*, hlm. 89.

<sup>89</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 72.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>91</sup> Ingleson, John. (tanpa judul asli). (A.b) Zamakhsyari Dhofier. *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. (Jakarta: LP3ES. 1983), hlm. 50.

<sup>92</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>93</sup> Ingleson, John. *Jalan ke Pengasingan. op.cit.*, hlm. 54-55.

<sup>94</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>95</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>96</sup> Ingleson, John. *Jalan ke Pengasingan. op.cit.*, hlm. 72.

Pada penutupan kongres dilaksanakan pengibaran bendera merah-putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sumpah Pemuda tidak lain adalah bentuk dari identitas nasional kebangsaan Indonesia yang menjadi simbol persatuan melawan penjajahan.<sup>97</sup> Serta merupakan hasil dari perjuangan para kaum terpelajar Indonesia yang menjadi penggerak nasionalisme kebangsaan Indonesia.

### III. Kesimpulan

Perkembangan ekonomi di Hindia Belanda mengalami perkembangan pesat pada akhir Abad ke-19. Sayangnya perkembangan ekonomi yang dialami Hindia Belanda berdampak pada penurunan kesejahteraan penduduknya. Usaha-usaha perbaikan kesejahteraan terhadap penduduk pribuni mulai dilakukan sekitar tahun 1900 yang dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi. Politik Etis tersebut kemudian melahirkan generasi yang sadar pendidikan dan politik.

Perhimpunan Indoneisa (PI) merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang didiriakna di Belanda tahun 1908 oleh mahasiswa Indonesia di Belanda. Awalnya PI bernama *Indische Vereeniging* yang bergerak dalam bidang Sosial-Budaya. Tujuannya ialah untuk mengadakan hubungan antara mahasiswa Indonesia di Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. sejak tahun 1913 karena pegasaruh Tiga Serangkai *Indische Vereeniging* mengalami perubahan orientasi kearah politis. Tahun 1922 *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* akibat dari pengaruh generasi baru yang datang tahun 1920-an.

Tahun 1925 *Indonesische Vereeniging* berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Ditahun yang sama pula PI mengeluarkan anggaran dasar yang menjasi azas perjuangan organisasai. Berkat perjuangan alumni PI yang pulang ke Indonesia PI mampu mempengaruhi organisasi pergerakan yang berkembang lebih awal di Indonesia. Bersama dengan Stidieclub Bandung, PI bahkan mampu mndirikan PNI yang menjadi organisasi nasionalis terbesar di masanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- [1]. Darmono (a.b.). (1967) "Politik Kolonial Belanda antara PD I-PD II". *Lembaran Sejatah*. No. 1. T.V., hlm. 1-26.
- [2]. Madeleon Djajadiningrat-Nieuwenhuis. (1993) "Noto Soeroto: His Ideas and the Late Colonial Intellectual Climate", *Indonesia*, [Tanpa Volume], No. 55. hlm. 41-72.

### Buku

- [1]. Ahmad Subardjo Djoyohadisuryo.(1978). *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- [2]. Akira Nagazumi.(1986). "Masa Awal Pembentukan "Perhimpunana Indonesia": Kegiatan Mahasiswa Indonesia Di Negeri Belanda, 1916-1917". Dalam Akira Nagazumi (ed). *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX-XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [3]. Allan Akbar. (2013) *Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelejen Politik Hindia Belanda*. Tangerang:Marjin Kiri.

---

<sup>97</sup> Suhartono. *op.cit.*, hlm. 79.

- [4]. Deliar Noer. (1990). *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LPES. 1990
- [5]. Dhont, Frank. (2005). *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia tahun 1920-an*. Yogyakarta: UGM Press.
- [6]. Djaka Soetapa. (1990) *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam Al-qur'an*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- [7]. Djohan Makmur, dkk. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Manggala Bhakti.
- [8]. Helius Sjamsudin. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2012
- [9]. Hiroyosi Kano. (1986). "Sejarah Ekonomi Rakyat Pedesaan Jawa: Suatu Interpretasi". Dalam Akira Nagazumi (ed). *Indonesia dalam Kajian Sejarah Jepang: perubahan Sosial Ekonomi abad XIX-XX dan Berbagai aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- [10]. Ingleson, John.(1983). (tanpa judul asli). (A.b) Zamakhsyari Dhofier. *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES.
- [11]. Ingleson, John. (1986). "Perhimpunan Indonesia and The Indonesian Nationalist Movement." A.b. Nin Bakdisoemanto. *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan* , Jakarta: Temprint.
- [12]. Jan Berman. (1986). *Pengusahaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- [13]. Jurusan Pendidikan Sejarah. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- [14]. Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tirta Wacana. 2013
- [15]. Mohammad Hatta. (2011). *Untuk Negeriku Jilid I: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Kompas.
- [16]. Mohammad Hatta. (2011). *Untuk Negeriku Jilid II: Berjuang dan Dibuang Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Kompas.
- [17]. Mubyarto, dkk. (1992). *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- [18]. Nasution. (1994). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [19]. Ong Hok Ham. (2005). *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: Bentang. 2005
- [20]. Sartono Kartodirdjo. (2005). *Sejak Indische Sampai Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- [21]. Slametmuljana. (1969). *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- [22]. Sudiyo. (2002). *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [23]. Sudiyo. (2004). *Perhimpunan Indonesia*. Jakarta: Bina Adiaksara.
- [24]. Sugiman. (1968). *Pengaruh Politik Ethis Dibiidang Perkembangan Pendidikan Di Indonesia*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- [25]. Suhartono. (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamsi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [26]. Supardi. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak.

**Majalah**

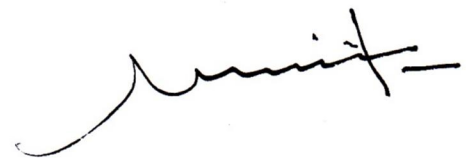
- [1]. Anonim. 1928. "Azas dan Daftar Oesaha P.N.I.". *Soeloeh Ra'jat Indonesia*. No. 15. Tahun ke-2. hlm. 107-108.
- [2]. Anonim. 1928. "Maksoed dan Toejoeanja P.N.I.". *Soeloeh Ra'jat Indonesia*. No. 7. Tahun ke-2. hlm. 23-25.

Reviewer



Dr. Aman, M. Pd.  
NIP. 19741015 2003 12 1 001

Yogyakarta, Agustus 2016  
Mengetahui,  
Pembimbing



Sardiman AM, M.Pd.  
NIP. 19510523 198003 1 001